

## **BAB V**

### **PENUTUPAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa hanya variabel proporsi dewan komisaris independen dan jumlah rapat komite audit yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Hal ini dikarenakan di Indonesia peran dewan komisaris yang independen sebagai penanggungjawab internal perusahaan yang mampu menekan dan memonitor manajemen secara efektif untuk membuat keputusan pengungkapan sesuai kepentingan *stakeholder* secara independen. Semakin seringnya rapat yang dilakukan dewan komisaris, maka tekanan kepada manajemen untuk meningkatkan transparansi dalam *voluntary disclosure* menjadi lebih tinggi.

Variabel proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, proporsi komite audit independen dan jumlah rapat komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Hal ini dikarenakan di Indonesia *voluntary disclosure* masih dianggap sebagai informasi yang cukup mengancam strategi kompetitif perusahaan jika dikonsumsi oleh publik walaupun disisi lain pengungkapan tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan dimata *stakeholder* sehingga dalam penerapannya proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, proporsi komite audit independen dan

jumlah rapat komite audit hanya menjadi formalitas belaka dalam memenuhi peraturan yang berlaku.

## **B. Keterbatasan dan Saran**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Penelitian ini hanya meneliti perusahaan di sektor manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian ini hanya meneliti dalam periode tiga tahun.

Terdapat beberapa saran yang dapat digunakan pada penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel perusahaan di sektor lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai pembandingan dan memperpanjang periode penelitian agar hasil penelitian lebih baik.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan proksi dari variabel *corporate governance* lainnya seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan dewan direksi.
3. Penelitian selanjutnya dapat menyesuaikan item-item *voluntary disclosure* dengan item yang terbaru sesuai peraturan yang berlaku untuk perusahaan *go public*.